

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang sering dikenal dengan Negara kepulauan. Dimana terdiri dari 33 provinsi dengan 416 kabupaten dan 98 kota. Dengan memiliki wilayah yang luas, maka bukanlah hal yang mudah untuk melakukan optimalisasi pembangunan. Terpisahnya wilayah Indonesia menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi disetiap wilayah berbeda. Salah satu pulau yang ekonominya terus bergulir yaitu Pulau Jawa.

Banyaknya kabupaten dan kota yang terdapat di negara Indonesia ini, agar mempermudah proses pembangunan, kini diberlakukan perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dengan sistem desentralisasi terdapat pelimpahan sebagian wewenang pusat kepada Pemerintah Daerah, yang diwujudkan dalam otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk untuk melakukan pembangunan daerah.

Setiap daerah memiliki kemampuan mengelola keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena

itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan kegiatan. UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat.

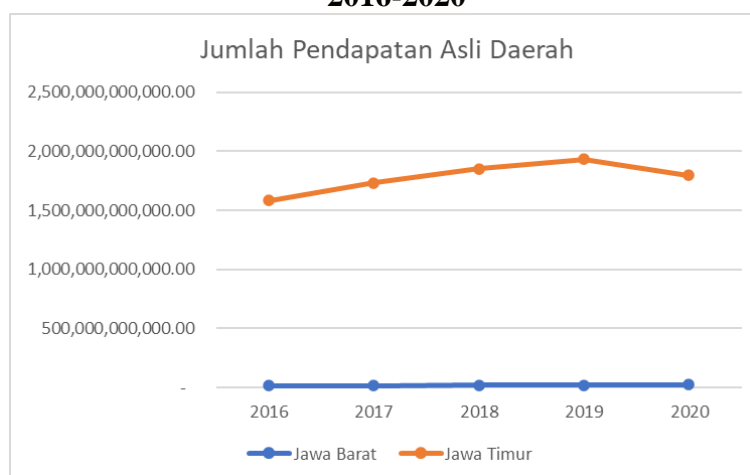
Dalam mewujudkan kinerja keuangan pemerintah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, kondisi makro ekonomi dan sumber daya manusia.² Pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah, karena kinerja pemerintah merupakan cerminan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Jawa adalah pulau yang memiliki tingkat kemajuan pembangunan tertinggi di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia terkonsentrasi di wilayah ini. Kekayaan sumber daya alam, Angkatan kerja usia muda yang berpendidikan, pasar domestic yang luas yang tumbuh secara tepat, digabungkan dengan kondisi sarana dan prasarana yang lengkap menjadi factor keunggulan pulau jawa. Provinsi jawa barat selama lebih dari tiga dekade telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sector manufaktur dan jasa.

² Yunus Harjito, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia*, (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FEB UN PGRI Kediri, Vol.5, No.1, 2020)

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat pendapatan asli daerah tertinggi setelah DKI Jakarta. Namun dalam kenyataannya pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih mengandalkan bantuan dari pusat yaitu dana perimbangan. Guna menyongsong pertumbuhan ekonomi yang lebih meningkat. Berikut ini pemaparan realisasi pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020.

Gambar 1.1
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, 2020 dan 2021

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat dengan 27 Kabupaten / Kota pada tahun 2016 pendapatan asli daerah sebesar 17.042.895.113,67, tahun 2017 sebesar 17.102.520.315,84, tahun 2018 sebesar 17.102.520.315,84, tahun 2019 sebesar 17.102.520.315,84, dan tahun 2020 sebesar 17.102.520.315,84. Realisasi pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 mengalami peningkatan secara

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan PDRBnya, dan memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan Provinsi Jawa Timur dengan 38 Kabupaten / Kota pada tahun 2016 pendapatan asli daerah sebesar 15.817.795.024.796,90, tahun 2017 sebesar 17.324.177.664.424,20, tahun 2018 sebesar 18.531.062.021.823,40, tahun 2019 sebesar 19.327.125.485.405,93, dan tahun 2020 sebesar 17.951.235.057.953,08. Realisasi pendapatan asli daerah provinsi Jawa Timur tahun 2016-2019 mengalami peningkatan secara signifikan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya wabah pandemi yang menyebabkan pendapatan masyarakat menurun.

Suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila pemerintah daerah tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatnya secara signifikan setiap tahunnya. Keberhasilan otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari pendapatan asli daerah, namun kenyataannya pemerintah daerah masih bergantung pada dana bantuan pusat yang disebut dana perimbangan. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

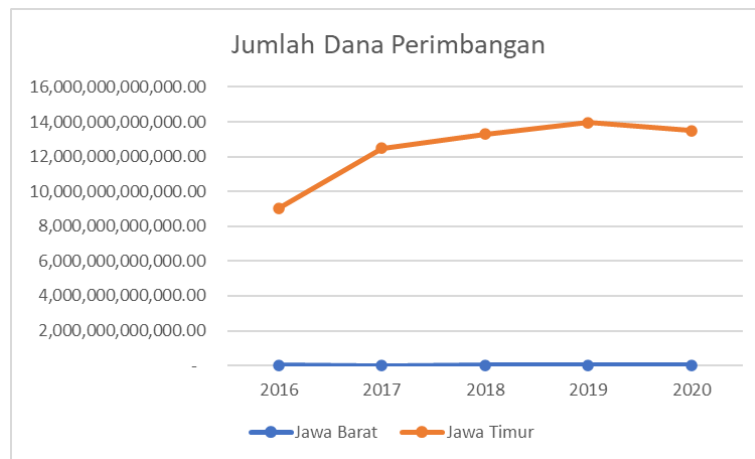
sendiri oleh Pemerintah Daerah.³ Pendapatan asli daerah dianggap sebagai tulang punggung pemasukan daerah, hal ini sangat dianggap penting dalam kontribusi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dana perimbangan merupakan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.⁴ Dana perimbangan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

³ Cerrya Dhia Wenny, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan, (Jurnal Ilmiah STIE MDP 2(1)Tahun 2012), Hal.41

⁴Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah, (Yogyakarta: CV.Budi Utama,2012), Hal. 10-11

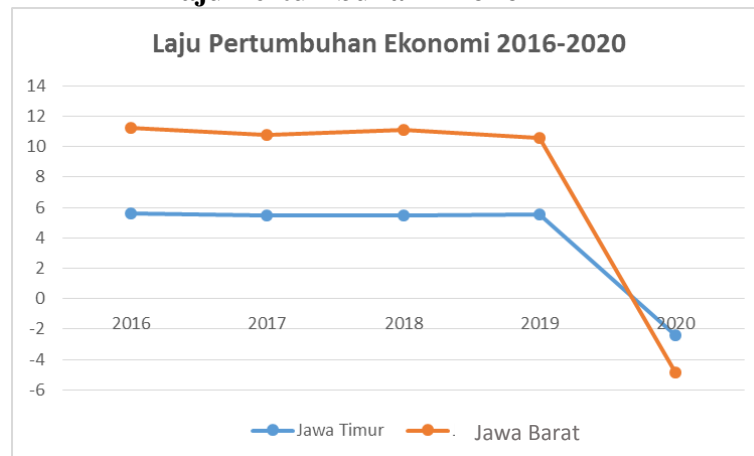
Gambar 1.2
Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, 2020 dan 2021

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 dana perimbangan sebesar 10.622.671.443,68, tahun 2017 sebesar 6.940.686.332,19, tahun 2018 sebesar 14.208.000.403,58, tahun 2019 sebesar 14.715.372.046,65, dan tahun 2020 sebesar 16.336.732.727,50. Sedangkan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 dana perimbangan sebesar 9.039.003.358.881,00, tahun 2017 sebesar 12.494.048.645.633,00, tahun 2018 sebesar 13.295.784.849.272,20, tahun 2019 sebesar 13.941.687.209.994,60, dan tahun 2020 sebesar 13.479.686.730.763,26.

Gambar 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi



Pada gambar 1.3 menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahunnya. Adanya pertumbuhan ekonomi dapat mengukur sejauh mana aktivitas ekonomi guna menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode yang telah ditentukan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam segala hal aktivitas perekonomian di suatu Negara pada periode tertentu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).⁵ Dimana Totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang

⁵ Rumanintya Lisaria Putri, *Perekonomian Indonesia*, (Bandung: Mangu Makmur Tanjung Lestari, 2019), Hal.58

dilakukan daerah disebut PDRB. Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan atas hasil dari pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.⁶ Penilaian kinerja sangat penting dilakukan bagi sebuah organisasi baik swasta maupun sektor publik. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting dilakukan untuk mengetahui penerepan kebijakan otonomi daerah pemerintah pusat. Harapannya bahwa pemerintah daerah agar dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan sehingga pembangunan dapat terselesaikan tanpa harus menunggu bantuan dari pusat.

Kinerja keuangan pemerintah merupakan citra mengenai tingkat atau hasil pencapaian pengelolaan keuangan atas tanggungjawab terhadap program kerja atau kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Jika ditinjau dari segi keuangan, terdapat kinerja keuangan yang merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

⁶ Mohammad Mahsun, dkk, *Akuntansi Sektor Public*, (Yogyakarta:BPFE,2006), Hal.25

Kinerja keuangan pemerintah dapat dianalisa menggunakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.⁷ Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun dikiran dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah di setiap daerah berbeda tingkat penerapan kinerja keuangan.

Keuangan daerah berasal dari beberapa sumber diantaranya yang Pertama, Seluruh sumber keuangan daerah yang telah ditetapkan sebagai sumber penerimaan daerah atau disebut pendapatan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kedua, sumber-sumber keuangan daerah juga dapat bersumber dari upaya-upaya tertentu yang dilakukan pemerintah daerah dan hasilnya akan diperoleh beberapa tahun kemudian misalnya adanya upaya pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum milik daerah yang mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan.

Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga menjadi

⁷ Abdullah Halim, *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), Hal. 230

acuan bagi daerah lain dalam pengaturan kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Maka penulis ingin meneliti dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2016-2020”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, penelitian ini penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa masalah dalam penelitian yaitu:

1. Pendapatan asli daerah menjadi tulang punggung pemasukan daerah, hal ini sangat dianggap penting dalam kontribusi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2. Dana perimbangan daerah bergantung pada bantuan pusat hal ini menunjukkan kinerja haruslah professional untuk bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik
3. Pertumbuhan ekonomi dapat mengukur sejauh mana aktivitas ekonomi guna menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode yang telah ditentukan.
4. Dana pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah, karena kinerja pemerintah merupakan cerminan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2016-2020 ?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2016-2020 ?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2016-2020 ?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2016-2020 ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2016-2020

2. Untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2016-2020
3. Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2016-2020
4. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2016-2020

E. Kegunaan Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama terhadap kajian mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang terlibat dalam

pelaksanaannya, khususnya bagi Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu, dapat dijadikan acuan dan masukan untuk meningkatkan kinerja mengoptimalkan fungsi dan peran informasi.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, keintelektual bagi pengembangan keilmuan khususnya dibidang Mata Kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik serta untuk penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan referensi atau acuan untuk peneliti selanjutnya.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian dijadikan sebagai subjek penelitian. Ruang lingkup pada penelitian ini berkaitan dengan Variabel independent dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3). Sedangkan variabel dependennya yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 2016-2020

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian perlu terdapat batasan tertentu guna mempermudah untuk melakukan penelitian dan hasil dapat akurat karena yang diteliti spesifik tidak menyeluruh. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan masalah. Kinerja keuangan pemerintah dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, kondisi makro ekonomi dan sumber daya manusia. Agar pokok bahasan dan lebih terperinci, maka keterbatasan penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

G. Penegasan Istilah

Dalam penyusunan skripsi ini, perlu adanya penegasan pengertian istilah yang terkandung didalamnya yang ditulis peneliti dari judul yang diangkat agar tidak terjadi kerancuan, kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman dalam membaca dan memahami proposal skripsi ini, dengan memberikan penegasan istilah baik secara konsep maupun secara operasional, berikut definisi konsep dan definisi operasional dari masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut.

1. Definisi Konseptual

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Warsito, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sendiri oleh

Pemerintah Daerah.¹⁶

Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonom asli daerah.⁸ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang dipungut oleh daerahnya sendiri guna untuk membangun dan mengembangkan suatu daerah.

b. Dana Perimbangan

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.⁹

c. Pertumbuhan Ekonomi

⁸ Cerrya Dhia Wenny, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan*, (Jurnal Ilmiah STIE MDP 2(1)Tahun 2012), Hal.41

⁹ UU Nomor 33 Tahun 2004

Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan output atau penambahan pendapatan nasional agregat dalam kurs waktu tertentu.¹⁰

d. Kinerja Keuangan

Merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.¹¹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai penjelasan dari judul penelitian agar tidak muncul lagi berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Yang dimaksud dari pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi apakah ada atau tidaknya pengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan definisi operasional

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang dibutuhkan untuk menjelaskan variable yang akan diteliti. Dan pada bab ini berisi

¹⁰ Robinson Taringan, *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara,2014), Hal.86

¹¹ Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, (Jakarta:Salemba Empat,2016),hal. 24

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan pemerintah. Lalu berisikan penelitian yang relevan, kerangka konseptual dan kerangka hipotesis

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menerangkan tentang populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, variable penelitian, dan sumber data

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum penelitian lalu menguji data yang telah didapat dengan menggunakan E-Views dan setelah hasil pengolahan data kemudian pembahasan yang mencakup variabel

BAB V Pembahasan

Meliputi analisis dan perhitungan hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada. Pembahasan dalam bab ini ialah analisis hasil temuan di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah ada.

BAB VI Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan serta saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan

Bagian akhir dari laporan ini berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran.